

# Strategi dan Peran Perbankan Dalam Mendukung Investasi Hijau dan Pembangunan Berkelanjutan

Aviliani

07 Juni 2023

# Keterbatasan APBN: Perlu dukungan pembiayaan swasta

## Kebutuhan dana untuk *Nationally Determined Contribution*

- Kebutuhan pembiayaan untuk memenuhi komitmen Indonesia terhadap target *Nationally Determined Contribution* (NDC) mencapai Rp3.779,63 triliun.

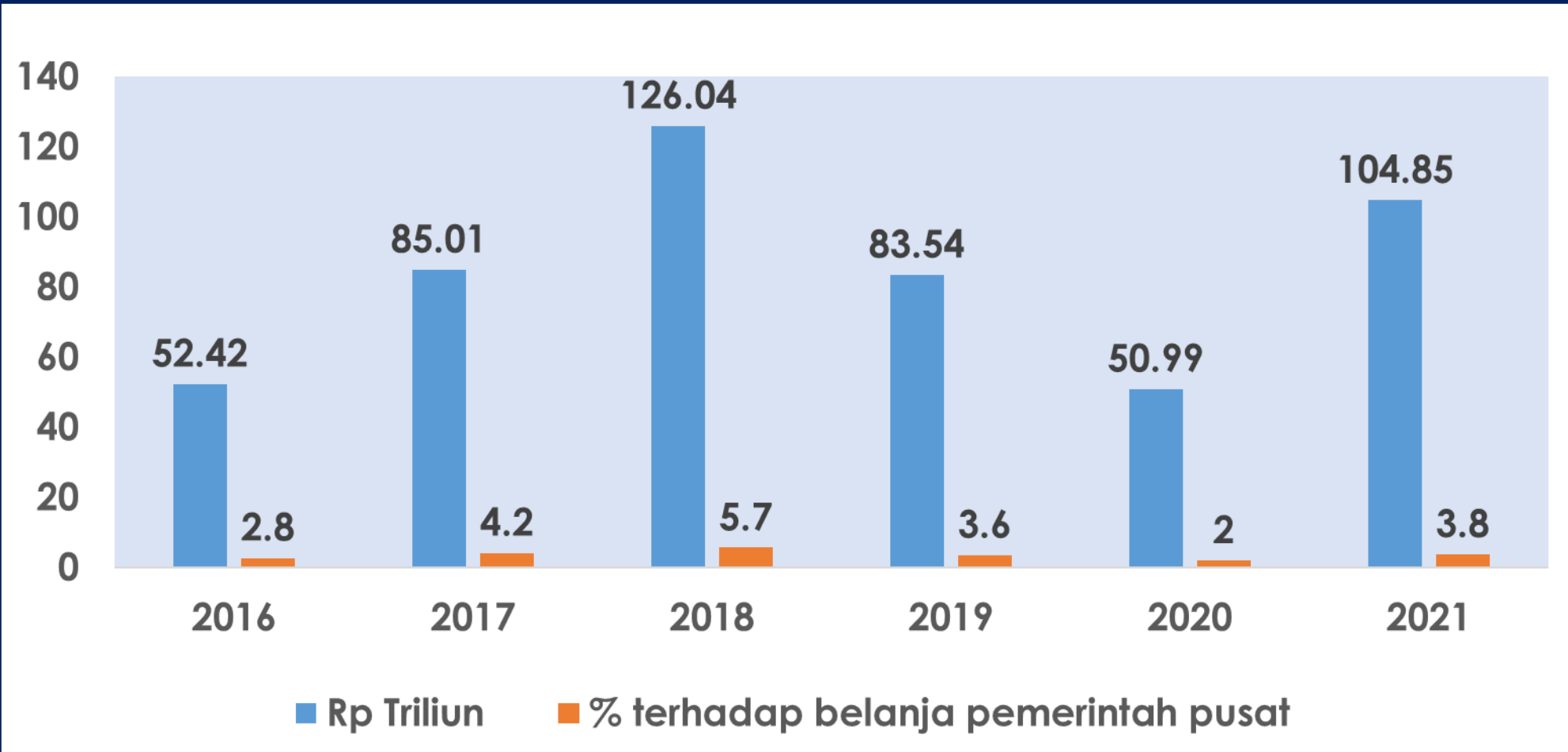
## Kontribusi pemerintah terbatas

- Kontribusi pemerintah setiap tahun mencapai Rp96,78 triliun atau 4,1% dari total *climate budgeting* sebesar Rp288,4 triliun.

## Mengisi gap pendanaan

- Total kebutuhan pembiayaannya sekitar Rp3.500-3.800 triliun.
- Perlu dukungan sekitar 2/3 dari kebutuhan dana setiap tahun dari sektor swasta.

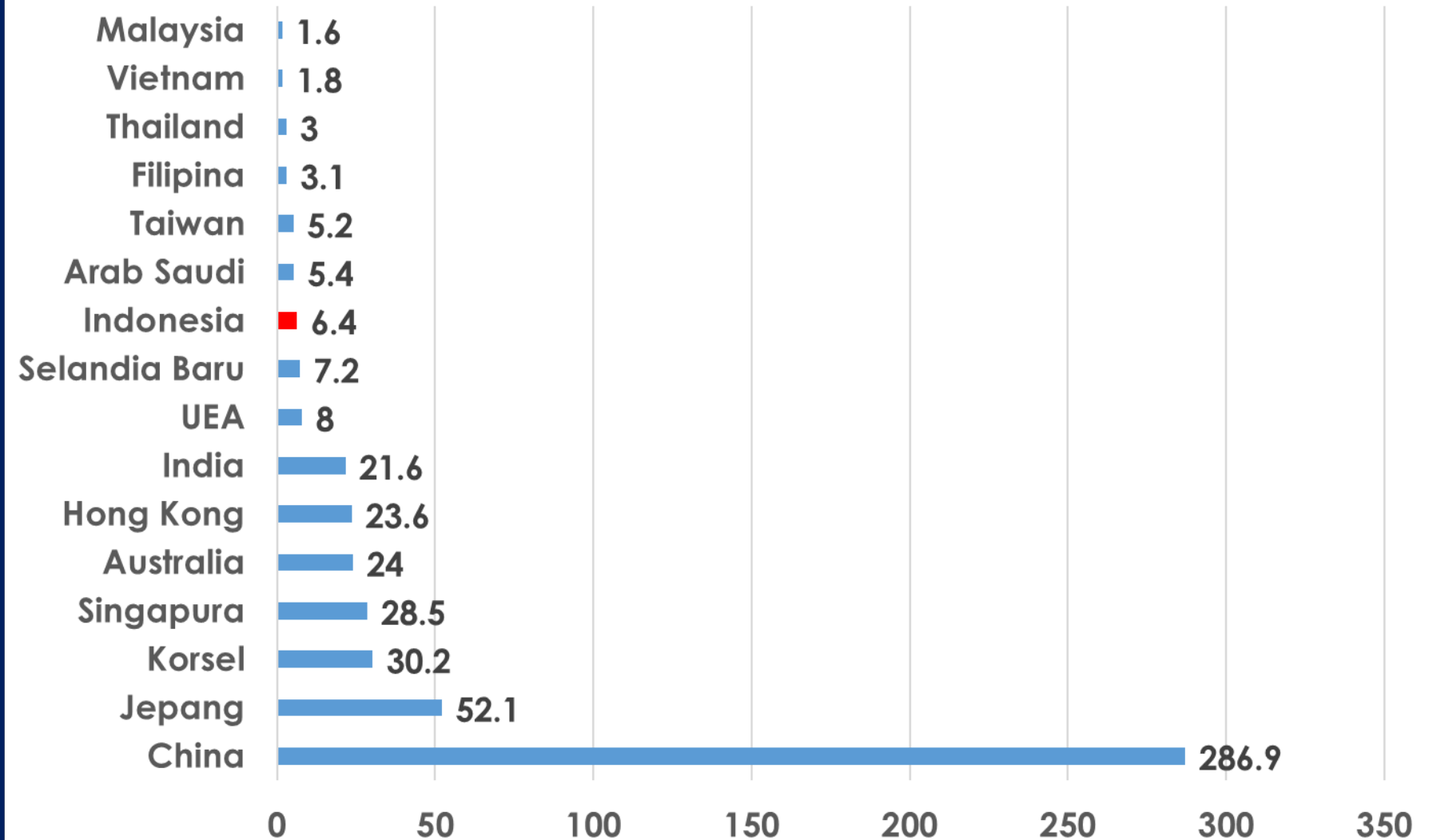
## Belanja Pemerintah untuk Perubahan Iklim



Sumber: Kemenkeu (dalam Kompas, 2022)

- Rata-rata pangsa belanja pemerintah pada perubahan iklim masih di bawah 5% dari belanja pemerintah pusat.

## Penerbitan Obligasi Hijau di Beberapa Negara (2018-2022)/US\$ Miliar



Sumber: Climate Bond Initiative (dalam Kompas, 2022)

# Peran Sektor Keuangan dalam Pembiayaan Hijau

## Dukungan regulasi

- Sebagai tindak lanjut atas UU P2SK, pengembangan Taksonomi Hijau Indonesia (THI) akan mencakup konsep *transition finance*.
- Tujuan → mendorong pembiayaan kegiatan usaha yang melakukan peralihan atau transformasi dari kegiatan yang menghasilkan emisi karbon tinggi menuju pada kegiatan yang lebih ramah lingkungan.

## Pembiayaan masih terbatas tetapi tumbuh

- Secara industri, pembiayaan perbankan berkategori hijau masih sekitar 15% dari total kredit.
- Namun, pertumbuhan pembiayaan hijau (khususnya bank-bank besar) naik rata-rata 25% per tahun selama 2020-2022.
- Alokasi terbesar → sektor pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang keberlanjutan, energi terbarukan, transportasi ramah lingkungan, serta pengelolaan air dan limbah berkelanjutan.

# ***Demand dan Supply Pembiayaan Hijau Perbankan***

## Demand

- Desakan ekonomi dunia.
- Incentive yang diberikan terhadap pelaku.
- *Stakeholder* (pemerintah, bank sentral, dan swasta) menilai manfaat signifikan ekonomi hijau.
- Gap pembiayaan antara kebutuhan dan ketersediaan tinggi.
- Pembiayaan dari pemerintah yang terbatas.
- Peran pembiayaan dari swasta perlu ditingkatkan sehingga swasta harus masuk

## Supply

- Portofolio bank masih didominasi pembiayaan non-hijau (bank memandang pembiayaan hijau berisiko tinggi)
- Aspek *liquidity mismatch risk*
- Pasar karbon yang belum berkembang.
- Persoalan sumberdaya manusia.
- Persoalan perbedaan suku bunga (hijau vs nonhijau).

# Langkah ke Depan Mendorong Pembiayaan Hijau Perbankan

## **Memacu peningkatan kapasitas lembaga keuangan**

- Kapasitas lembaga keuangan masih terbatas dalam mengidentifikasi risiko-risiko sosial dan lingkungan.
- Tantangan muncul dari ketersediaan sumberdaya manusia.
- Kurangnya tenaga ahli/kompeten di proyek hijau (tenaga ahli penilai independen proyek hijau).
- Kebutuhan sertifikasi tertentu dari lembaga internasional.

## **Perlu incentive dari pemerintah dan regulator sektor keuangan**

- *Incentive* diperlukan untuk mengelola risiko pembiayaan berbasis lingkungan.
- Perlu meningkatkan *incentive* pada proyek-proyek pemerintah ramah lingkungan.
- Kemudahan untuk mendapatkan *incentive*.

## Mengelola likuiditas pada proyek-proyek hijau

- Sebagian besar pembiayaan hijau berdurasi panjang sehingga perbankan harus mampu mengelola risiko *liquidity mismatch*.
- Konsep pembiayaan konsersium semakin relevan.

## Aspek ketersediaan pembiayaan

- Komparasi perbandingan suku bunga kredit hijau vs non hijau.
- Sebagian besar pembiayaan demoninasi berbasis lingkungan menggunakan valas.
- Berpotensi memunculkan exchange rate risk dan interest rate risk.
- Perlu meningkatkan pembiayaan berdemonasi Rupiah.



## ***Dukungan Regulasi: Kebijakan Makroprudensial***

### ***LTV, FTV dan RPIM untuk pembiayaan hijau***

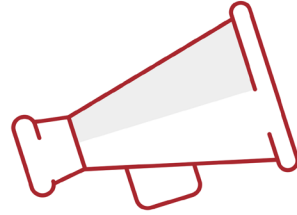
- Implementasi kebijakan makroprudensial sejak 2019 mendorong pertumbuhan pembiayaan hijau berupa ketentuan rasio Green Loan to Value (LTV)/ Financing to Value (FTV), dan Green Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM).

## ▪ **Ketentuan rasio LTV/FTV**

- Bank dapat memberi pembiayaan atau kredit hingga 100 persen khusus untuk properti berwawasan lingkungan.
- Properti dapat berupa rumah tapak, rumah susun, dan ruko atau rukan yang memenuhi kriteria bangunan hijau dengan nilai agunan berkisar Rp 5 miliar-Rp 10 miliar.
- BI menghapus ketentuan batasan minimum uang muka untuk pembelian kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*). Sebelumnya, uang muka minimum 5-20 persen.
- Ketentuan rasio LTV/FTV dan uang muka kendaraan bermotor listrik berlaku sampai akhir tahun 2023 dan diharapkan dapat mempercepat pengurangan emisi karbon.

- ***Penyaluran kredit atau pembiayaan ke sektor-sektor hijau juga digenjut dengan pemberian insentif.***
  - Sejak April 2023 → nsentif kredit ke UMKM yang bergerak di bidang lingkungan dan perubahan iklim.
  - Insentif berupa pelonggaran giro wajib minimum (GWM) paling tinggi 1,5 persen.
  - Pelonggaran GWM dinilai cukup menarik akan meningkatkan likuiditas perbankan.

# Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II



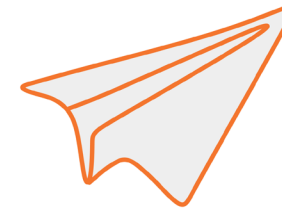
## Meningkatkan Kesadaran / Increasing Awareness

1. **Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap I** (2015 - 2019).  
*Sustainable Finance Roadmap Phase I (2015 - 2019).*
2. Pengenalan **prinsip keuangan berkelanjutan**.  
*Introduction of sustainable finance principles.*
3. Pengenalan **kategori kegiatan usaha berkelanjutan**.  
*Introduction of sustainable business activities category.*
4. Pengembangan **insentif**.  
*Development of incentive schemes.*
5. Program **pengembangan kapasitas**.  
*Capacity building programs.*



## Celah / Gap

1. Rendahnya pemahaman industri.  
*Low awareness of the industry.*
2. Belum adanya standarisasi hijau.  
*Unavailability of green standard.*
3. Peluang besar yang belum dimanfaatkan.  
*Untapped opportunities.*
4. Belum terintegrasinya risiko LST.  
*ESG risk has not been integrated.*
5. Peningkatan koordinasi dan kerja sama dengan K/L.  
*Improvement on coordination and collaboration with ministries/institutions.*



## Mempercepat Transisi menuju Keberlanjutan / Accelerating the Transition to Sustainability

1. Pengembangan di sisi **Penawaran**:
  - Skema insentif,
  - Inovasi produk,
  - Teknologi dan informasi,
  - Pengembangan kapasitas sumber daya manusia.**Supply side development:**
  - Incentive schemes,
  - Product innovation,
  - Information and technology,
  - Capacity building.
2. Pengembangan di sisi **Permintaan**:
  - Kampanye nasional,
  - Dukungan program riil,
  - Pengembangan industri pendukung,
  - Sertifikasi "green".**Demand side development:**
  - National campaign,
  - Real programs,
  - Development of supporting industries,
  - "Green" certification.



Gambar 1. Prinsip Keuangan Berkelanjutan Indonesia /

**Sekian dan Terima Kasih**